

HARIAN
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK
01 MARET 2011

PENDIRI:
Ardi, S.Si, Apt

BUTON, BUTENG, BUSEL, BUTUR, WAKATOBI, MUNA, MUBAR, KOLAKA
BOMBANA, KENDARI, BAUBAU

Baubau Post

KORAN NOMOR SATU DI KEPULAUAN BUTON

BaubauPost.com

Jumat
06 Desember 2024

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

Dekranasda Prov. Sultra Gelar Lomba Fashion Show Tenun dan Pameran Kerajinan Sultra 2024, Berikut Juaranya



Laporan: Mashuri, Baubau Post, Durasi Times

SULTRA, BP- Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., membuka secara resmi Lomba Fashion Show Busana Tenun dan Pameran Kerajinan Sultra 2024 di Hotel Claro Kendari, Kamis (05/12/2024), dengan mengusung tema "Perajin Sejahtera, Sultra Maju", kegiatan ini bertujuan mempromosikan kain tenun Sultra sebagai warisan budaya lokal yang bernilai tinggi.

Acara ini dihadiri oleh Pj. Ketua Dekranasda Sultra sekaligus Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sultra, Dra. Hj. Wa Ode Munanah Asrun Lio, para Bupati/Walikota se-Sultra, kepala

Lanjutkan ke Hal: 7

Pemprov Sultra Ikuti Rakor Inflasi dan Buton Utara Tercatat Sebagai Daerah dengan IPH Tertinggi



Pewarta: Kasrun

SULTRA, BP-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian

Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Surat Edaran Bersama

Lanjutkan ke Hal: 7

Disdikbud Baubau Perkenalkan Metode Pandai Berhitung Gasing



Laporan: Andina L

BAUBAU, BP-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Baubau memperkenalkan metode pandai

berhitung Gasing (Gampang, Asyik dan Menyenangkan) pada pembukaan pelatihan Gasing

Lanjutkan ke Hal: 7

Pemkot Baubau Tanamkan Semangat Anti Korupsi Lewat Lomba Baca Puisi



Laporan: Kasrun

BAUBAU, BP-Dalam menanamkan kesadaran dan semangat anti korupsi sejak dini, Pemkot Baubau menggelar lomba baca

puisi anti korupsi tingkat SD, SMP dan SMA se Kota Baubau di aula

Lanjutkan ke Hal: 7



Andina Latief, SKM
DIREKTUR

SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA
PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubauPost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post
(www.baubauPost.com) Sebagai Media Terverifikasi
per Tanggal 30 Desember 2022



Dekranasda Prov. Sultra Gelar Lomba Fashion Show Tenun dan Pameran Kerajinan Sultra 2024, Berikut Juaraanya

OPD lingkup Pemprov Sultra, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo, serta Ketua Dekranasda dan DWP Kabupaten/Kota se-Sultra.

Sambutan Pj. Ketua Dekranasda Prov. Sultra, Dra. Hj. Wa Ode Munanah Asrun Lio menekankan pentingnya pelestarian kain tenun sebagai identitas budaya Sultra.

“Kain tenun Sultra tidak hanya menjadi pakaian adat, tetapi juga busana yang diminati di tingkat nasional dan internasional. Kami berharap motif dan warna kain tenun terus berkembang tanpa melupakan nilai filosofinya,” ujarnya.

Sekda Sultra Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menyampaikan apresiasi kepada Dekranasda Sultra atas penyelenggaraan kegiatan ini. Ia menekankan pentingnya regenerasi perajin tenun agar tradisi ini tetap lestari.

“Kita harus mendo-

rong generasi muda untuk melanjutkan tradisi menenun. Selain itu, pengerjaan kain tenun harus dilakukan sepenuhnya di Sulawesi Tenggara agar nilai ekonominya tetap dirasakan oleh masyarakat lokal,” kata Asrun Lio. Untuk mendukung pengembangan kain tenun Sultra, Sekda mengajak instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi, dan Dinas Pariwisata, untuk berkolaborasi.

Kegiatan ini juga menampilkan karya-karya busana tenun dari seluruh kabupaten/kota di Sultra dengan menyelenggarakan lomba. Pengumuman pemenang dilakukan berdasarkan beberapa kategori:

Kategori A: Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota

Juara 1: Ketua Dekranasda Kab. Kolaka Timur

Juara 2: Ketua Dekranasda Kab. Buton Selatan

Juara 3: Ketua Dekranasda Kab. Muna Barat

Kategori B: Ketua DWP Kabupaten/Kota

Juara 1: Ketua DWP Kab. Muna

Juara 2: Ketua DWP Kota Baubau

Juara 3: Ketua DWP Kab. Bombana

Kategori C: Kepala OPD dan Ketua DWP Lingkup Pemprov Sultra

Juara 1: Dinas BPS-DM Sultra

Juara 2: Badan Kesbangpol Sultra

Juara 3: Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang

Kategori Desain terbaik Motif, penampilan terbaik dan Favorit yaitu:

Motif dan Desain Terbaik: Dinas Pariwisata Sultra

Desainer Terbaik: Aidah

Penampilan Terbaik: Dinas PMPTSP Sultra

Favorit: Ketua Dekranasda Kab. Konawe Utara

Pameran lomba kerajinan Tahun 2024

Produk kerajinan Terbaik yaitu:

Disfusi Tenun Terbaik: Dekranasda Kab. Muna Barat

Anyaman Terbaik: Dekranasda Kab. Buton

Tenun Terbaik: Dekranasda Kab. Muna

Selain itu, penataan Stand terbaik Dekranasda Kab/Kota se-Sultra

Juara 1: Dekranasda Kab. Bombana

Juara 2: Dekranasda Kab. Muna

Juara 3: Dekranasda Kab. Kolaka

Acara ini diharapkan memperkuat posisi kain tenun Sultra di pasar nasional dan internasional serta meningkatkan kesejahteraan para perajin.

Selamat kepada para pemenang. Mari terus berkarya untuk melestarikan budaya Sultra dengan menunjukkan komitmen untuk memajukan seni dan budaya lokal, menjadikan kain tenun sebagai ikon yang membanggakan di kancah global. (*)

Pemkot Baubau Tanamkan Semangat Anti Korupsi Lewat Lomba Baca Puisi

kantor Wali Kota Baubau Palagimata Rabu (4/12/2024) . Lomba dihadiri Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi, SP, M.Si sekaligus memeriahkan peringatan Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) tahun 2024 yang akan jatuh 9 Desember 2024 mendatang.

Dalam sambutannya , Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi, SP, M.Si mengungkapkan, melalui lomba baca puisi dapat menanamkan kesadaran serta semangat anti korupsi pada generasi muda. Hanya saja, yang namanya puisi itu pasti ada orang yang membentur-

kan terkait pribadi dengan melanggar aturan dan ada yang dirugikan dan dilakukan dengan masif.

Karena itu, jika faktanya terus menerus memiliki kebiasaan itu terus terjadi ke generasi nanti pada saatnya akan masuk pada dunia kerja selanjutnya masuk di dunia birokrasi akan menjadi hal yang berbahaya dan banyak hal-hal kecil yang dilanggar.Bila dahulu sebelum masuk dunia kerja dan birokrasi tidak mendapat hukuman akan tetapi setelah masuk di dunia kerja dan birokrasi itu hukumannya sampai pemecatannya karena telah terbiasa.

Menurut Dr Rasman, sudah banyak falsafah hidup dan nasehat orang tua sejak 400-500 tahun yang lalu artinya bahwa nilai-nilai itu bukan baru saja tapi sudah lama dan tantangan kedepan dan kalaupun yang dianggap sudah mengetahui hal-hal yang diperdebatkan sampai pada level makrifat akan tetapi pelaksanaannya oleh diri ternyata jauh.

“Baubau tidak terbiasa dengan yang namanya prank , dianggap main-main padahal bohongan akhirnya terbiasa hal-hal seperti itu yang membuat satu generasi kehilangan nilai-nilai kebenaran,” ujarnya. (*)

Disdikbud Baubau Perkenalkan Metode Pandai Berhitung Gasing

di SD Negeri 2 Baubau Rabu (4/12/2024).

Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi, SP, M.Si saat membuka pelatihan Gasing tersebut memberikan apresiasi kepada Disdikbud bersama tim Gasing dan Prof. Yohanes Surya yang telah memperkenalkan metode gasing .“Saya ketahui beberapa waktu yang lalu dan saya berfikir kita harus dapat manfaatnya di Kota Baubau sehingga ketika saya menjadi Pj Wali Kota saya perintahkan ke Kadis Pendidikan untuk segera mengkomunikasikan secara intensif kepada Prof. Yohanes Surya beliau punya banyak ilmu dan pengalaman yang mungkin bisa disumbangkan untuk Kota Baubau dan saya kira inilah motede yang kita kerjasamakan,”ujarnya.

Menurut Dr Rasman, bila bicara perkembangan suatu negeri yang paling pertama itu adalah sumber daya manusianya. Dan sumber daya manusia yang pertama adalah pendidikan, formal ataupun informal. Kemudian yang mempersiapkan itu, bukan semata-mata guru namun ada pemerintah, ada stakeholder lain tetapi yang paling di depan yang punya tanggungjawab itu adalah guru, pendidik dan Dinas Pendidikan.

Oleh sebab itu, untuk guru di Kota Baubau segera harus sering melakukan sarasehan atau pertemuan-pertemuan dengan PGRI membicarakan tentang perlindungan dan peningkatan kompetensi pendidik dari TK sampai SMP. Sehingga pola yang dibangun hari ini adalah salah satu pola untuk membuat Kota Baubau unggul.

Metode GASING adalah metode pembelajaran matematika yang dikembangkan oleh Prof. Yohanes Surya, Ph.D. sejak tahun 1996. Metode ini bertujuan untuk membuat anak-anak menyukai pelajaran matematika dengan cara belajar sambil bermain. Beberapa karakteristik metode GASING adalah Konkret, yaitu dimulai dengan hal yang konkret sehingga mudah dimengerti, Mencongak, yaitu menghitung dengan mencongak sehingga memacu kerja otak kanan, Membangun pola berpikir imajinasi, Membangun kecerdasan kosa kata , Membangun kecerdasan angka dan rasional, Membangun kecerdasan ruang/tempat/gambar, Membangun kecerdasan interpersonal dan intrapersonal.

Beberapa tahapan pembelajaran dalam metode GASING adalah: Dialog sederhana, Berimajinasi, Menyajikan contoh-contoh soal yang relevan, Menyajikan materi secara mendalam, Memberikan variasi soal. Metode GASING diklaim dapat meningkatkan hasil belajar murid, meningkatkan kepercayaan diri, dan membuat murid lebih mandiri, disiplin, bertanggung jawab, dan jujur. (*)

Pemprov Sultra Ikuti Rakor Inflasi dan Buton Utara Tercatat Sebagai Daerah dengan IPH Tertinggi

(SEB) tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kegiatan ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Sultra pada Selasa, 3 Desember 2024.

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Acara turut dihadiri oleh Menteri Perlindungan PMI Abdul Kadir Karding, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli, PH.D., Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd., Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini, Deputy III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, serta Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Yusra Egayanti.

Dari Sultra, kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan BPS Sultra, Karantina Kendari, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra, Dinas Ketahanan Pangan Sultra, dan instansi terkait lainnya.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa inflasi secara year-on-year menunjukkan penurunan, tetapi inflasi man-to-man (bulanan) dari Oktober ke November 2024 mengalami kenaikan, terutama pada sektor makanan, minuman, dan tembakau.

Mendagri mengingatkan beberapa komoditas pangan yang perlu diantisipasi pada bulan Desember 2024, yaitu:

1. Bawang merah (kenaikan harga di 322 kabupaten/kota);

2. Bawang putih (kenaikan harga di 225 kabupaten/kota);

3. Minyak goreng (kenaikan harga di 215 kabupaten/kota);

4. Daging ayam ras dan telur ayam ras.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini, menyampaikan bahwa pada November 2024 terjadi inflasi secara man to man (bulan ke bulan) sebesar 0,30 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan ke bulan pada Oktober 2024. Sementara itu, inflasi year-on-year (tahun ke tahun) tercatat sebesar 1,55 persen, dan inflasi tahun kalender dari Januari hingga November 2024 mencapai 1,12 persen.

Berdasarkan data

Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) hingga 29 November 2024, indeks perkembangan harga (IPH) pada Minggu keempat November menunjukkan kenaikan tertinggi di 10 kabupaten/kota. Salah satu daerah dengan kenaikan IPH tertinggi adalah Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, yang mencatat perubahan IPH sebesar 4,76 persen.

Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap kenaikan IPH di Buton Utara adalah daging ayam ras, cabai rawit, dan ikan kembung. Secara umum, komoditas penyumbang utama kenaikan IPH di 10 wilayah tersebut didominasi oleh daging ayam ras dan bawang merah.

Pemerintah melalui empat kementerian resmi menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). SEB ini disusun oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI.

Surat Edaran ini meru-

pakan tindak lanjut dari Rapat Kabinet Tahun 2023 yang bertujuan memperkuat tata kelola penempatan dan perlindungan PMI. Fokus utama SEB adalah memastikan perlindungan menyeluruh bagi calon PMI, PMI yang bekerja di luar negeri, serta keluarganya melalui berbagai program strategis.

Poin Penting Surat Edaran Bersama

1. Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola PMI

Surat Edaran ini mengatur pelaksanaan tata kelola penempatan dan perlindungan PMI dengan beberapa poin penting:

a. Sosialisasi dan Informasi:

Memberikan informasi tentang mekanisme, layanan terkait penempatan dan perlindungan PMI, serta peluang kerja di luar negeri kepada masyarakat.

b. Pendidikan dan Pelatihan Kerja:

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon PMI agar memenuhi standar kebutuhan kerja di luar negeri.

c. Fasilitasi Penyelesaian Masalah PMI:

Memberikan bantuan dalam penyelesaian permasalahan PMI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Fasilitasi Pemulan-

gan PMI:

Memfasilitasi pemulangan PMI dari debar-kasi ke daerah asal.

e. Layanan Terpadu Satu Atap:

Menyediakan layanan terpadu yang memudahkan pengurusan administrasi dan perlindungan PMI.

f. Tugas Lainnya:

Menjalankan tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Tugas Pemerintah Daerah dan Desa

SEB menginstruksikan agar pemerintah daerah dan desa mendukung pelaksanaan tata kelola PMI melalui langkah-langkah berikut:

Gubernur, Bupati/Wali Kota:

Menyusun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait tata kelola PMI sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan strategis nasional di bidang ketenagakerjaan.

Melaporkan pelaksanaan program kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Desa PDTT, dan Menteri Perlindungan PMI/Kepala BP2MI.

Kepala Desa:

Menyusun Peraturan Desa yang mendukung tata kelola PMI di tingkat desa.

Melaporkan pelaksanaan tata kelola PMI secara berkala setiap enam bulan atau sewaktu-waktu kepada Gubernur melalui Bupati/Wali

Kota.

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dilakukan setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Dengan pelaksanaan SEB dan langkah pengendalian inflasi yang terintegrasi, pemerintah berharap dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas harga pangan, serta meningkatkan perlindungan PMI di setiap tahapan penempatan kerja. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, hingga desa diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam menjaga perekonomian dan melindungi pekerja migran Indonesia. (*)

Alasan PDIP Tak Pecat Jokowi saat Jadi Presiden: Hormati Status



DPP PDIP menyatakan menghormati status Jokowi saat jadi presiden, karena itu tidak memecatnya.

JAKARTA, BP-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mengungkapkan alasan partai tak langsung memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader meski berseberangan sikap di Pilpres 2024 lalu. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun menjelaskan PDIP menghormati status Jokowi sebagai presiden dua periode di Republik Indonesia. “Pak Jokowi berseberangan dengan PDI Perjuangan itu kan sejak beliau masih aktif jadi presiden,” kata Komar di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (4/12) malam.

“Bagaimanapun kita tetap jaga kehormatan dia sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi itu kita jaga. Tidak bisa kita ambil tindakan pemecatan,” imbuhnya. Ia pun menegaskan Jokowi secara de facto bukan lagi kader partai banteng moncong putih itu. Oleh karena itu, menurut Komar, pengakuan Jokowi masih memiliki kartu tanda anggota (KTA) PDIP merupakan pernyataan yang tak tahu malu. “Secara de facto dia bukan anggota partai lagi. Itu pernyataan yang tidak tahu malu saja itu,” ujarnya. Komar mengatakan

penegakkan disiplin partai berlaku kepada semua kader. Dia meminta Jokowi segera mengembalikannya KTA. Dia mengaku telah diberikan tugas oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menjaga kehormatan partai dan integritas ketua umum. “Proses partai tetap berlangsung, pada akhirnya kalau tidak dikembalikan, ya akan kita pecat. Tidak bisa begitu dong, masa yang lain kita pecat, Pak Jokowi ada keistimewaan apa?” Kata Komar. “Yang paling istimewa di PDI Perjuangan itu hanya Megawati Soekarnoputri.

Karena dia berjuang berdarah di partai sampai partai besar hari ini,” imbuhnya. Sebelum nya, Jokowi ia hanya tersenyum saat ditanya mengenai status keanggotaannya di PDIP. Namun, ia mengaku masih menyimpan KTA PDIP. “Ya masih,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Selasa (3/12). Kemudian pada Kamis (5/12) ini menjawab awak media di Solo soal status keanggotannya setelah disebut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bukan lagi bagian dari PDIP, Jokowi menjawab, “Ya partainya partai perorangan. Ya udah itu.”(*)

Jokowi Respons Disebut Hasto Bukan Lagi PDIP: Partainya Perorangan

SOLO, BP-Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara terkait keanggotaannya di PDIP. Kepada sejumlah wartawan di Solo, Jokowi pun menjawab soal partainya saat ini setelah dinyatakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan Jokowi dan keluarganya bukan lagi bagian dari PDIP. “Ya berarti partainya perorangan,” kata Jokowi saat dimintai tanggapan atas pernyataan Hasto, Kamis (5/12). Pada kesempatan itu, Jokowi makan siang bersama awak

media di sebuah rumah makan tak jauh dari kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Jokowi tidak menanggapi lebih jauh lagi apa yang dimaksud dengan pernyataannya itu. Meskipun ditanya lagi soal status keanggotaannya di PDIP, Jokowi hanya tersenyum dan mengulangi pernyataannya. “Ya partainya partai perorangan. Ya udah itu,” kata ayah dari Wapres RI Gibran Rakabuming Raka tersebut. Lebih lanjut, Jokowi juga tidak menjawab saat ditany

ya mengenai tawaran untuk bergabung dengan Partai Golkar. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lagi-lagi mengulangi pernyataannya sambil tersenyum. “Partainya partai perorangan,” kata dia lagi. Belakangan, Gibran yang berpasangan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto memenangkan Pilpres 2024. Langkah Gibran bisa menjadi peserta Pilpres 2024 tak lepas dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kala itu masih dipimpin adik ipar Jokowi, Anwar Usman. Anwar Us-

man kemudian dinyatakan melanggar etik oleh MKMK dan dicopot dari kursi ketua MK, namun itu tak membuat pencalonan Gibran di Pilpres 2024 gagal. Prabowo-Gibran pun telah dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 sejak 20 Oktober lalu. “Saya tegaskan kembali bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi jadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (4/12). Dia menyinggung ambisi Jokowi yang

Golkar Mau Tampung Jokowi Usai Tak Diakui PDIP: Dekat dengan Ketum

Jakarta, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji meyakini Presiden RI Ketujuh Joko Widodo akan mempertimbangkan bergabung dengan partai politik. Partai Golkar pun mau menampung Jokowi bila presiden RI ke-7 itu hendak bergabung dengan partai politik. Pernyataan itu disampaikan Sarmuji merespons Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menegaskan Jokowi dan keluarganya saat ini bukan lagi menjadi bagian dari partai Banteng Moncong putih. “Pak Jokowi adalah orang yang merdeka, bebas, beliau bebas menentukan pilihan. Saya meyakini pak Jokowi pasti akan melakukan pertimbangan banyak, untuk masuk ke partai politik,” kata dia di kompleks parlemen, Kamis (5/12). Sarmuji menegaskan bahwa Golkar sangat terbuka jika setelahnya Jokowi ingin bergabung. Seb-

agai mantan Presiden, dia meyakini Jokowi masih memiliki pengaruh yang besar di masyarakat. “Orang biasa saja kita terima secara terbuka apalagi seorang mantan presiden, seorang presiden periode lalu yang kami yakin pengaruhnya masih cukup besar di masyarakat,” katanya. Hingga saat ini Sarmuji mengaku belum menerima tindakan Jokowi akan bergabung dengan Golkar. Meski begitu, dia memastikan kedua pihak cepat atau lambat akan bertemu. Menurut Sarmuji, Ketua Umum Bahlil Lahadalia memiliki hubungan yang dekat dengan eks kader PDIP itu. “Enggak nanti pasti akan [ketemu], kan hubungan ketua umum dengan Pak Jokowi kan hubungan yang cukup dekat. Pasti kalau ada sinyal pak Jokowi mau merapat Golkar, orang-orang dekat kita akan kasih tahu,” katanya. Sekjen PDIP Hasto

Kristiyanto menegaskan bahwa Jokowi dan keluarga kini bukan menjadi bagian dari partai. Menurut dia, Jokowi sudah tidak sejalan dengan idealisme partai sejak mencalonkan putranya lewat Mahkamah Konstitusi (MK) pada pilpres lalu. “Saya tegaskan kembali bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi jadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto, Rabu (4/12). Hasto menyinggung ambisi Jokowi yang tak pernah berhenti untuk berkuasa. Dia kembali menyinggung sikap partainya di Rakernas V dan telah meminta maaf atas sikap Jokowi karena telah melupakan cita-cita yang membentuknya. “Dan pada rapat kerja nasional yang kelima kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya bisa berubah dan melupakan cita-cita yang membentuknya,” katanya.(*)

Jokowi Buka Suara soal Disebut Bukan Bagian dari PDIP Lagi

SOLO-Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait keanggotaannya di PDIP. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan Jokowi dan keluarganya bukan lagi bagian dari PDIP. “Ya berarti partainya perorangan,” kata Jokowi kepada awak media saat dimintai tanggapan atas pernyataan Hasto, Kamis (5/12). Pada kesempatan itu, Jokowi makan siang bersama awak media di sebuah rumah makan tak jauh dari kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Jokowi tidak menanggapi lebih jauh lagi apa yang dimaksud dengan pernyataannya itu. Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka itu juga tidak menjawab saat ditanya mengenai status

keanggotaannya di PDIP. Ia hanya tersenyum dan mengulangi pernyataannya. “Ya partainya partai perorangan. Ya udah itu,” kata Jokowi. Lebih lanjut, Jokowi juga tidak menjawab saat ditanya mengenai tawaran untuk bergabung dengan Partai Golkar. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lagi-lagi mengulangi pernyataannya sambil tersenyum. “Partainya partai perorangan,” kata dia lagi. Elite PDIP Minta Jokowi Kembalikan KTA: Kami Ingin Jaga Kehormatan Dia. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan Jokowi dan keluarganya, termasuk Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution bukan lagi bagian dari keluarga PDIP. Menurut Hasto, Jokowi sudah tidak

sejalan dengan idealisme partai sejak mencalonkan putranya, Gibran, lewat Mahkamah Konstitusi (MK) pada pilpres lalu. “Saya tegaskan kembali bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi jadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata dia di Sekolah Partai, Rabu (4/12). Dia menyinggung ambisi Jokowi yang tak pernah berhenti untuk berkuasa dan karenanya, PDIP telah meminta maaf atas sikap Jokowi tersebut. “Dan pada rapat kerja nasional yang kelima kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya bisa berubah dan melupakan cita-cita yang membentuknya,” katanya.(*)

“Dan pada rapat kerja nasional yang kelima kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang

Pemprov Dukung Pengembangan Produk dan Peningkatan Daya Saing Pengrajin, Sekda Sultra Buka Rakerda Dekranasda Sultra



KENDARI, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus memberikan dukungan terhadap pengembangan produk kerajinan dan peningkatan daya saing pengrajin, termasuk diantaranya saat Sekda Sultra, Drs. H Asrun Lio.,M.Hum.,Ph.D mewakili Pj. Gubernur, Komjen Pol. (P) Dr (H.C) Andap Budhi Revianto.,S.I.K.,M.H menghadiri sekaligus membuka secara resmi Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dekranasda Provinsi Sultra, Selasa (3/12/2024). Turut hadir Ketua Dekranasda Provinsi Sultra, Dra Hj Wa Ode Munanah Asrun Lio.

“Kehadiran kita pada Rakerda hari ini, merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dan mitra dalam melaksanakan pembangunan di daerah yang memiliki sejumlah tujuan,” terangnya.

Sekda Sultra mengatakan, sejumlah tujuan tersebut yakni :

1. Terkait peningkatan dan pemerataan pendapatan daerah,
2. Peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja,
3. Peningkatan dan pemerataan lapangan berusaha,
4. Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik, dan
5. Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Daerah.

“Pencapaian tujuan ini tentunya tidak mudah. Dukungan dan kesediaan semua pihak untuk saling bersinergi sangat dibutuhkan. Saya berharap agar OPD terkait, BUMN/ BUMD, perbankan dan lembaga lainnya, dapat bekerja bersama Dekranasda, pada pelaksanaan program kegiatan yang ditunjukan untuk mendukung berkembangnya produk kera-

ajinan, sekaligus peningkatan daya saing pengrajin,” pesannya.

Sekda Sultra mengatakan, kolaborasi antara seluruh stakeholder, tentunya akan mempercepat terciptanya peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja dan peningkatan serta pemerataan lapangan berusaha bagi seluruh masyarakat Sultra.

“Pertemuan hari ini sangat penting, karena Dekranasda merupakan salah satu intitusi nirlaba yang telah lama menjadi mitra Pemerintahan Daerah, untuk melaksanakan program kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk membina dan mengembangkan produk kerajinan dan produk UMKM,” katanya.

Tentunya, lanjut Sekda Sultra, hal ini sangat membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan program kegiatan pembangunan, yang bertujuan untuk membina dan mengembangkan produk kerajinan Produk UMKM dan tentunya ini sangat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap, pertemuan ini dapat menyepakati adanya sinkronisasi atau keselarasan program kegiatan dalam rangka mengembangkan produk kerajinan Sultra, mengembangkan usaha dan meningkatkan kehidupan pelaku bisnisnya,” tuturnya.

Sekda Sultra, Asrun Lio menerangkan, sebagai mitra Pemerintahan di daerah,

Dekranasda diharapkan untuk dapat saling bersinergi dalam melakukan program dan kegiatan, dan juga meningkatkan kompetensi Sumber daya manusia pengrajin, sehingga dapat melahirkan ide-ide kreatif, serta menghasilkan produk kerajinan yang berkualitas dan tetap berbasis pada tradisi dan warisan budaya dari Sulawesi Tenggara, dan tentunya yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan perajin.

“Saya juga berharap pada pertemuan ini, selain dapat merumuskan strategi dalam bersinergi melaksanakan program kegiatan, juga dapat melahirkan ide-ide kreatif untuk mengatasi tantangan yang di hadapi Dekranasda dalam pengembangan Kerajinan Sulawesi Tenggara, seperti masih rendahnya kualitas SDM, teknik produksi, pemasaran,” harapnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili, Kepala OPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi dan Dekranasda kabupaten Kota se-Sultra, para Pengurus Dekranasda Provinsi dan kabupaten Kota, dan para pihak terkait lainnya. (*)

Dorong Pelaku Usaha Berinvestasi di Bumi Anoa, Pemprov Sultra Gelar Rakor Percepatan Realisasi Investasi Sultra

SULTRA, BP- Dalam rangka mendorong pelaku usaha untuk berinvestasi di Bumi Anoa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar rapat koor-

dinasi percepatan realisasi investasi, Selasa (3/12/2024), di Kendari. Pada kesempatan itu, Sekda Sultra, Drs. H Asrun Lio.,M.Hum.,Ph.D me-

wakili Pj. Gubernur, Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto.,S.I.K.,M.H mengatakan, momen tersebut bertepatan dengan 3 Desember, merupakan hari yang

istimewa, sebab sejumlah hari bersejarah diperingati pada tanggal ini.

Dia mengatakan, momen istimewa tersebut antara lain peringatan Hari Penyandang Dis-

abilitas Internasional, Hari Bakti Pekerjaan Umum, Hari Operasi Transplantasi Jantung Manusia Pertama, bahkan Let's Hug Day. “Tanggal 3 Desember menjadi kian istimewa, karena hari ini kita menyelenggarakan rapat koordinasi percepatan realisasi investasi Sultra, sebagai salah satu upaya untuk mendorong para pelaku usaha agar bersegera berinvestasi di Bumi Anoa, baik dalam bentuk penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN),” katanya.

Menurut Sekda Sultra, besarnya potensi investasi di Sultra dapat dilihat dari sumber daya alam yang melimpah, mulai dari pertambangan, perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan, hingga pariwisata.

Dia melanjutkan, berbagai potensi investasi yang dimiliki daerah lain juga ada di Sultra, namun tidak semua potensi yang dimiliki Sultra, dimiliki oleh daerah lain di Indonesia. Terlebih, Sultra juga termasuk daerah yang aman, nyaman, heterogen, toleran, dan memiliki kondisi yang layak untuk dijadikan tujuan investasi yang menarik, dengan iklim investasi yang mestinya juga berdaya saing.

“Sudah sepatutnya jika masyarakat Sultra ini sejahtera, tidak layak ada kemiskinan ekstrim di negeri kaya raya ini. Seyogyanya sektor investasi memberi kontribusi besar dalam perhitungan produk domestik regional bruto (PDRB) membuka lapangan kerja yang luas, mengentaskan pengangguran, dan kemiskinan juga meningkatkan daya beli masyarakat,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan III Tahun 2024, menunjukkan realisasi investasi Sultra masih 8,32 triliun atau 32,49 dari target nasional sebesar 25,61 triliun (dua puluh lima koma enam satu triliun rupiah) atau 37,81% dari target daerah sebesar rp 22 triliun (dua puluh dua triliun rupiah. Artinya, target ini seharusnya realistis untuk dicapai.

“Dengan kata lain, angka target tersebut sudah sesuai dengan meta indikator

perhitungan realisasi investasi selisih 3,61 triliun antara target nasional dan target daerah. Saya kira masih dalam kisaran yang wajar. Tim perencana pembangunan daerah, tentu bisa memotret dari jarak yang lebih dekat, memahami kondisi daerah dengan lebih spesifik,” katanya lagi.

Masih Sekda Sultra, sementara tim perencana pembangunan nasional, pasti melihat potensi investasi dengan lebih makro, kemudian membreak-down-nya ke tiap-tiap provinsi, termasuk Sultra, tentu juga mempertimbangkan target realisasi investasi nasional sebesar Rp. 1.650 triliun.

“Adanya 10 proyek strategis nasional (PSN) di Sultra dengan total nilai rencana investasi sebesar Rp. 45,49 triliun, PSN ini berkontribusi besar dalam menentukan besarnya target investasi Sultra. Sampai saat ini, PSN belum menunjukkan realisasi investasi yang berarti. Mohon kiranya, kementerian investasi dapat mencermati PSN ini,” harapnya.

Kesempatan itu juga, Sekda Sultra mengatakan, berkaitan dengan proses bisnis, DPMPTSP menerima permohonan izin lalu dimohonkan rekomendasi teknisnya kepada perangkat daerah yang membidangi, jika perangkat daerah teknis mekomendasi untuk diterbitkan izinnya, maka DPMPTSP akan menerbitkannya.

Begitupun sebaliknya, masih dia, jika tidak mendapat persetujuan penerbitan izin dari perangkat daerah teknis, tentu DPMPTSP tidak dapat menerbitkan izin.

“Kita juga sudah memiliki satuan tugas percepatan pelaksanaan perizinan berusaha di Sultra, jauh sebelum itu kita sudah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010, tentang pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi di Sultra, jika regulasi yang ada perlu direvisi atau mari kita revisi, jika perlu dibuatkan aturan baru atau mari kita buat sesuai ketentuan,” tambahnya.

Sekda Sultra menyampaikan, hal-hal yang perlu dievaluasi dapat dimulai dari pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apakah ada yang menghambat?

Apakah proses kebijakan Perizinannya dinilai pelaku usaha mempersulit? Apakah strategi promosi yang dilakukan selama ini Sudah efektif? Ataukah publikasi potensi investasi tim daerah tersebar ke masyarakat luas, tetapi tidak menyasar kalangan investor, apakah tim Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sudah bersinergi dengan pelaku usaha? Apakah pengaduan pelaku usaha sudah ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat Atau bisa jadi semua hal tersebut perlu dikoreksi atau ada faktor lain yang menghambat realisasi investasi Sultra kiranya dapat diungkap.

“Kami berharap, kesempatan ini digunakan oleh para pelaku usaha yang hadir dalam rapat koordinasi ini, untuk terbuka menyampaikan informasi. Negara ini hanya akan bisa maju, jika semua elemen bangsa memberikan sumbangsih sesuai kapasitas masing-masing, investor dengan investasinya, pemerintah dengan birokrasi melayani. Demikian halnya dengan perangkat daerah yang hadir, sekiranya mengungkapkan apa yang menjadi tantangan dan hambatan-nya selama ini,” harapnya lagi.

Dia juga berharap, agar Deputi sekiranya membantu memberikan solusi sehingga pada triwulan IV nantinya, realisasi investasi Sultra dapat menjadi lebih baik.

Turut hadir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/BPKM atau yang mewakili, Ketua Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara atau yang mewakili, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) atau yang mewakili, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra atau yang mewakili.

Selanjutnya, Direktur Utama Bank Sultra atau yang mewakili, para Pejabat Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Sulawesi Tenggara dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara Beserta Jajaran, para Pelaku Usaha Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri, dan berbagai pihak ter-

Pj. Bupati Buton Launching Dua Proyek Perubahan Peserta Diklat PIM II



BUTON, BP-Penjabat Bupati Buton, La Haruna, SP, MSi melaunching Proyek Perubahan (Proper) yakni Aksi Strategis Pelayanan Integrasi Kesehatan Sekolah (Asyik School) dan Akuntabilitas Pengawasan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan (Atasan Jaka).

Peluncuran tersebut Dua Proper tersebut bertempat di Aula Bupati Buton Kompleks Perkantoran Takawa

Pasarwajo, Rabu, 4 Desember 2024.

Pj. Bupati Buton dalam sambutannya mengapresiasi dua Proper yang diluncurkan oleh dua kepala OPD Yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, Syafaruddin, SKM, MKes dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton, Ramli Adia, SKom, MSi yang sedang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK II Angka-

tan XXXV BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024.

“Semoga dengan Diklat PIM ini bisa mengedepankan kolaborasi dengan stakeholder terkait,” ungkap Pj. Bupati

Pelatihan ini bertujuan untuk mencapai inovasi target kerja dalam organisasi dipimpinnya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya

dalam pelayanan kesehatan dan bidang perhubungan dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Buton

Pemerintah Kabupaten Buton akan terus mendukung proyek ini dan mengajak pada semua stakeholder untuk berkolaborasi dengan jangka waktu yang akan datang dan tidak berhenti pada saat Pendidikan selesai. (*)

Tiga OPD di Buteng Lakukan PKS dengan TP PKK Terkait Pelaksanaan Program PLAKAT

Pewarta: Rahim

BUTENG, BP-Pemkab Buton Tengah melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) terkait program Plakat (Pemanfaatan Lahan Perkarangan Terpadu) di aula pancana, kantor Bupati Buteng, Senin (25/11/2024).

Ketiga OPD tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Pertanian, Dinas Pangan di tambah PKK.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Pj Bupati Buton Tengah, Kostantinus Bukide, untuk mengoptimalkan Program Plakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan lo-



kal, menanggulangi stunting, dan mendukung program makan bergizi gratis sebagaimana diamatkan dalam peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2024 tentang Status Gizi Nasional.

Pemenuhan kebutuhan pokok dan dukungan pada program Nasional dalam laporan pengantar yang disampaikan Asisten III Sekretariat Daerah Buton Tengah, Sam-

suddin Pamone, menyampaikan bahwa program PKS ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi lintas sektor dalam mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan stok makan bergizi gratis di setiap jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA.

“Kami harapkan dengan perjanjian ini, kebutuhan makan bergizi gratis dapat terpenuhi”,ujarnya. Implementasi Pro-

gram Plakat sebagai Inovasi Daerah Pj Bupati Buteng, Kostantinus Bukide, dalam sambutannya menekankan bahwa program Plakat adalah Inovasi daerah yang diakui oleh Pemerintah pusat tahun 2023. Program ini bertujuan mengurangi ketergantungan Buton Tengah terhadap pasokan pangan dari daerah lain.

“Selama ini, Buteng adalah daerah

Dinas Kesehatan Buton Tengah Menggelar Evaluasi Intervensi Spesifik Stunting Triwulan III Tahun 2024.



BUTENG, BP-Sebagai upaya mempercepat penurunan prevalensi stunting hingga target nasional 14% pada akhir tahun 2024, Dinas Kesehatan Buton Tengah (Buteng) menggelar evaluasi intervensi Spesifik Stunting Triwulan III tahun 2024.

Kegiatan ini melibatkan lintas sektor dan berlangsung di aula Dinas Kesehatan Buton Tengah, Senin (25/11/2024).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh staf ahli Bupati Buton Tengah bidang ekonomi, pembangunan, dan keuangan, Jamuri mewakili Pj Bupati Buton Tengah, Kostantinus Bukide.

Dalam sambutannya, Jamuri menyampaikan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan salah satu program prioritas nasional sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.

“Stunting merupakan persoalan kesehatan esensial yang berdampak jangka panjang terhadap generasi masa depan. Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan semua pihak dengan pendekatan intervensi spesifik dan terpadu”,ungkap Jamuri.

Menurut data survei kesehatan nasional (SKI) 2023, prevalensi stunting Buton Tengah telah menurun dari 41,6% pada tahun 2022 menjadi 36,8% tahun 2023. Se-

mentata itu, data rutin Puskesmas EPPGBM menunjukkan angka 15,7% pada tahun 2023, dan saat ini berada di 14,4% berdasarkan capaian pengukuran 96,2% dari sasaran bayi Balita

“Meskipun telah terjadi penurunan, angka ini masih membutuhkan kerja keras dan kolaborasi lintas sektor untuk mencapai target yang telah ditetapkan”,tambahnya.

Jamuri juga menekankan pentingnya peran intervensi sensitif, yang mencakup 70% dari upaya pencegahan stunting. “Misalnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang (PUTR) harus bersinergi dengan Dinas Kesehatan untuk mengidentifikasi keluarga yang belum memiliki akses jamban sehat dan air bersih, sehingga pembangunan fasilitas sanitasi dapat dilakukan secara tepat sasaran”,jelasnya.

Dalam pertemuan ini, Dinas Kesehatan Buteng juga menyampaikan laporan evaluasi intervensi yang telah dilakukan selama Triwulan III, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan evektifitas program Triwulan berikutnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh OPD terkait, tenaga kesehatan, serta sejumlah stakeholder yang memiliki peran penting dalam percepatan penurunan stunting. (*)

konsumen. Dengan Plakat, kita targetkan kebutuhan seperti sayur-mayur dapat dipenuhi secara mandiri, sehingga kita bisa menjadi daerah produsen. Minimal, kebutuhan sehari-hari tidak lagi didatangkan dari luar”,jelasnya.

Ia berharap bahwa kedepan tidak hanya tiga OPD, tetapi seluruh OPD di Buteng dapat terlibat dalam implementasi program ini untuk mempercepat pemenuhan gizi masyarakat.

Dukungan terhadap Program Presiden Prabowo, Pj Bupati menambahkan bahwa Program Plakat sejalan dengan Program unggulan Presiden Prabowo Subianto tentang makan bergizi gratis, mulai dari Paud, TK, hingga SMA.

“Buton Tengah harus siap mengantisipasi kebutuhan ini. Dengan sinergi lintas OPD dan PKK, saya yakin tahun 2025 setidaknya setengah kebutuhan pangan dapat

kita suplai secara mandiri”,imbuhnya.

Harapan dan tindak lanjut Penandatanganan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mewujudkan Buton Tengah sebagai daerah yang mandiri pangan sekaligus mendukung visi nasional terkait gizi dan stunting.

“Mari bersama kita wujudkan kerja nyata, sehingga manfaat program ini dapat dirasakanlangsungoleh masyarakat”,tutup Pj Bupati. (*)

Puan Wanti-wanti Pimpinan KPK Baru Tak Politisasi Kasus Korupsi



Ketua DPR Puan Maharani mewanti-wanti pimpinan KPK baru tak melakukan politisasi dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Pewarta: Alwan

JAKARTA-Ketua DPR Puan Maharani mewanti-wanti pimpinan KPK baru tak melakukan politisasi dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. Puan berharap pimpinan baru ke depan terutama bisa memitigasi dan mencegah korupsi.

Pernyataan itu disampaikan Puan usai menggelar rapat Paripurna pengesahan terhadap 5 nama capim dan 5 calon dewas KPK baru periode 2024-2029, Kamis (5/12).

“Semoga menjadi sosok yang bisa memitigasi korupsi,

mengantisipasi korupsi. Kemudian jangan ada politisasi dalam penegakan korupsi. Jadi sebesar-besarnya, sebaiknya adalah untuk memberantas korupsi,” kata Puan.

Menurut Puan, mekanisme seleksi dan pemilihan capim dan cadewas di DPR kini sudah selesai. Selanjutnya, pihaknya akan berkirim surat ke Presiden untuk menyerahkan hasilnya.

Puan mengatakan presiden setelah ini memiliki kewenangan penuh untuk melantik daftar nama-nama tersebut sebelum masa jabatan

pimpinan sebelumnya habis pada pertengahan Desember mendatang.

“Sudah selesai mekanisme yang ada di DPR. Setelah ini tentu saja akan kami kembalikan bersurat kepada presiden atau pemerintah. Selanjutnya tentu saja akan ditetapkan oleh presiden dan pemerintah,” kata dia yang juga Ketua DPP PDIP tersebut.

Adapun lima nama calon pimpinan KPK 2024, yakni Setyo Budiyo sebagai Ketua (mantan Direktur Penyidikan KPK), Johanis Tanak (Komisioner KPK saat ini), Fitroh Ro-

hcahyanto (jaksa yang sempat menjadi Direktur Penuntutan KPK), Agus Joko Pramono (mantan Wakil Ketua BPK) dan Ibnu Basuki Widodo (hakim di Pengadilan Tinggi Manado).

Sementara di kursi dewan pengawas KPK akan diisi oleh Chisca Mirawati (Founder & Managing Partner CMKP Law), Benny Ma-

moto (mantan Ketua Harian Kompolas), Wisnu Baroto (jaksa), Sumpeno (hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta) dan Gusrizal (Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda).(*)

Komnas HAM: Tindakan Aipda Robig Tembak Siswa SMK Semarang Langgar HAM

JAKARTA-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyimpulkan tindakan Aipda Robig Zaenudin menembak siswa SMKN 4 Semarang almarhum Gamma Rizkynata Oktafandy (GRO) telah memenuhi unsur pelanggaran HAM.

Kesimpulan itu diperoleh dari pemantauan yang dilakukan sejak 28 hingga 30 November 2024 di Kota Semarang.

Koordinator Subkomisi Pemantauan Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan pihaknya telah meminta keterangan Polda Jawa Tengah, Polresta Semarang dan Bidpropam Polda Jawa Tengah.

Kemudian meminta keterangan keluarga korban dan para saksi.

Tim, tutur Uli, juga telah meninjau lokasi tempat kejadian peristiwa penembakan di sekitar Jalan Candi Penataran Raya Kalipancur Ngaliyan dan Jalan

Simongan, serta meminta keterangan dari kedokteran forensik dan digital forensik.

“Berdasarkan pemantauan tersebut, Komnas HAM menyatakan tindakan Sdr. RZ telah memenuhi unsur-unsur adanya pelanggaran

HAM berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” kata Uli melalui siaran pers, Kamis (4/12).

Ia mengungkapkan jenis-jenis pelanggaran HAM yang terjadi dalam pen-

embakan tersebut. Pertama, pelanggaran hak hidup (Pasal 9 ayat (1) UU HAM) dan pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing).

Dia menuturkan pihaknya menyimpulkan telah terjadi extrajudicial killing karena ada penembakan yang dilakukan Aipda Robig dan mengakibatkan hilangnya nyawa Gamma. Selain itu dua rekan Gamma yakni S dan A mengalami luka-luka akibat tembakan Aipda Robig.

Peristiwa penembakan itu terjadi Minggu (24/11) sekitar pukul 00.19 WIB di depan minimart Jalan Candi Penataran, Kota Semarang.

Komnas HAM menyatakan Aipda Robig sebagai aparat negara yaitu anggota Sat Res Narkoba Polresta Semarang, dan aparat penegak hukum (kepolisian) selain itu penembakan dilakukan tidak dalam rangka pembelaan diri.

Dari temuan Komnas HAM mereka menyimpulkan Aipda Robig tidak sedang menjalankan tugas dan tidak dalam posisi terancam atas lewatnya sepeda motor yang dikendarai tiga korban tersebut.

Anggota Satres Narkoba Polresta Semarang itu pun tidak sedang menjalankan perintah Undang-undang untuk menembak tiga korban tersebut.

Selanjutnya, Komnas HAM, juga menyimpulkan terjadi pelanggaran hak untuk bebas dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan (Pasal 33 ayat (1) UU HAM. Uli mengatakan tindakan penembakan Aipda Robig secara sengaja dan tidak mempunyai kapasitas berdasarkan UU telah mengakibatkan hilangnya nyawa GRO dan luka yang dialami S dan A adalah bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaannya.

Uli menambahkan tindakan pen-

embakan melanggar prinsip-prinsip dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yaitu legalitas, nesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal.

Tindakan Aipda Robig disebut juga melanggar hak atas perlindungan anak (Pasal 52 ayat (1) UU HAM. Tiga korban yaitu GRO, S dan A masih kategori anak (berusia di bawah 18 tahun).

Atas hal tersebut di atas, Komnas HAM mengeluarkan sejumlah rekomendasi yakni meminta Kapolda Jawa Tengah untuk melakukan penegakan hukum secara adil, transparan dan imparial, baik etika, disiplin, dan pidana kepada Aipda Robig.

Melakukan evaluasi secara berkala atas penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian di lingkungan Polda Jawa Tengah, termasuk asesmen psikologi secara berkala.

Kemudian memberikan evaluasi pemahaman dan atau pengetahuan anggota polisi di lingkup Polda Jawa Tengah mengenai Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, khususnya untuk polisi tingkat Bintara.

Selanjutnya melakukan penegakan hukum terhadap kasus tawuran secara humanis dan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga negara lain di tingkat provinsi untuk mengatasi permasalahan tawuran di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

Komnas HAM juga merekomendasikan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan saksi dan korban, termasuk pemulihan bagi keluarga korban atas peristiwa tersebut.

Aipda Robig saat ini berstatus terdakwa etik di Propam Polda Jateng, namun belum menjalani si-

dang karena petugas masih mengumpulkan bukti. Selain itu pihak keluarga korban pun sudah melaporkan dugaan pidana Aipda Robig ke Polda Jateng.

Kasus itu sudah naik penyidikan, namun belum ada tersangka sejauh ini.

Polda Jateng telah menggelar prarekonstruksi terkait kasus penembakan yang dilakukan Aipda Robig. Prarekonstruksi penembakan itu dilakukan pada sekitar tengah malam kemarin, yakni Rabu (4/12) sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Candi Penataran.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto mengatakan prarekonstruksi tengah malam lalu itu dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng terkait laporan keluarga almarhum Gamma.

“Semalam prarekonstruksi kasus yang ditangani Ditkrimum terhadap kasus tindak pidana kasus yang dilaporkan orang tua almarhum,” kata Artanto, Kamis (5/12) mengutip dari detik-Jateng.

Adapun mengenai status Aipda Robig dalam kasus pidana yang sudah naik penyidikan tersebut, Artanto mengatakan masih belum ada penetapan tersangka.

“Saat bersangkutan (Robig) jadi tersangka, langsung dalam waktu dekat akan rekonstruksi lengkap bersama stakeholder lain,” tegas Artanto.

Sementara untuk sidang etik terhadap Aipda Robig, Artanto mengatakan petugas juga masih melengkapi bukti-bukti.

“Yang pasti (sidang kode etik) akan secepatnya karena penyidik yang menilai kapan berkas siap dan kapan sidangnya. Dan ini sudah jadi atensi pimpinan,” jelas Artanto.

“Berkas masih penyidikan. Yang bersangkutan sesegera mungkin akan di naikkan tersangka setelah gelar perkara. Bukti bukti masih dikumpulkan maksimal dulu,” imbuhnya. (*)



**PEMERINTAH DAERAH
KOTA BAUBAU
BADAN KESBANGPOL**

Mengucapkan

**SELAMAT MERAYAKAN
NATAL DAN TAHUN BARU 2025**

*Merry
Christmas*
HAPPY NEW YEAR
2025

Dr. H. Muh. Rasman Manafi, SP, M,Si

Pj Walikota Baubau



La Ode Aswad, S.Sos., M.Si

Pj Sekda Baubau

Drs. Muh Amaludin, M.Si

Kadis

**Dinsos Baubau Beri Bimbingan
Sosial Pada Keluarga PPKS**



BAUBAU, BP-Dinas Sosial (Dinsos) Kota Baubau menyelenggarakan kegiatan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PPKS Kota Baubau Selasa (3/12/2024). Hal ini sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab anggota keluarga PPKS serta memberikan pengetahuan dan keterampilan demi terlaksananya usaha kesejahteraan keluarga dan menyelesaikan kesulitannya dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Dan juga memberikan pengaruh psikologis kepada keluarga supaya timbul usaha dari keluarga itu sendiri untuk menyelesaikan kesulitannya, sehingga keluarga menolong dirinya sendiri ke arah perbaikan.

Pj Wali Kota Baubau yang diwakili Staf Ahli Moch Amsir Afie, S.Sos, M.Si dalam sambutannya mengatakan, bimbingan sosial adalah hal yang sangat tepat dilaksanakan dan menjadi bagian dari perhatian Pemerintah Kota Baubau dalam

membina dan mengangkat derajat para keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis.

Menurut Moch Amsir Afie, hambatan kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlambatan, kecacatan ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung dan menguntungkan hal ini membutuhkan perhatian dan bantuan dari pemerintah utamanya Pemerintah Kota Baubau. Kami telah mencanangkan tagline Baubau bekerja bersama, apa yang kita laksanakan pada hari ini merupakan wujud dari semboyan tersebut, pemerintah

bekerja bersama berupaya untuk memberikan bantuan secara nyata, katanya.

Pemkot Baubau berharap peserta benar-benar memanfaatkan moment yang penting dan baik ini dengan keseriusan dan kesungguhan hati sehingga dapat menambah ilmu, wawasan dan meningkatkan kualitas. Dan apa yang didapatkan dalam bimbingan sosial dapat dijadikan pengalaman dalam menjalani kehidupan.

Sementara itu, pada kesempatan tersebut, mewakili Pj Wali Kota Baubau Moch Amsir Afie menyerahkan bantuan berupa sembako kepada keluarga PPKS. (ardi)



**PEMERINTAH DAERAH
KOTA BAUBAU
DINAS PARIWISATA**

Mengucapkan

**Selamat dan Sukses
Sultra Tenun Karnaval
di Kendari**

Sabtu 7 Desember 2024



Dr. H. Muh. Rasman Manafi, SP, MSi

Pj. WALIKOTA BAUBAU



LM. Idrus Taufiq Saidi

Kadis



**PEMERINTAH DAERAH
KOTA BAUBAU
DINAS TENAGA KERJA**

Mengucapkan

**SELAMAT MERAYAKAN
NATAL DAN TAHUN BARU 2025**

*Merry
Christmas*
HAPPY NEW YEAR
2025

Dr. H. Muh. Rasman Manafi, SP, M,Si

Pj Walikota Baubau



La Ode Aswad, S.Sos., M.Si

Pj Sekda Baubau

Mohammad Abduh, STP, M.Si

Kadis